

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 dapat disusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Cimahi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Cimahi. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel, dan semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah-Nya bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Cimahi, Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720520 199901 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Cimahi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017- 2022. Hasil capaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tercapai 3,1397 atau masuk kategori berprestasi Sangat Tinggi;
2. Indikator Opini BPK untuk Kota Cimahi Tahun 2019 mendapat opini WTP sesuai target;
3. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat tercapai 80,75 dari target indeks 80;
4. Indikator SAKIP tercapai Nilai 60,68 dengan Predikat B dari target BB;
5. Indikator Angka Kemiskinan tercapai 4,3% dari target 7,5%;
6. Indikator Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan tercapai 43% dari target 80%.

Sepanjang Tahun 2019, Sekretariat Daerah Kota Cimahi melaksanakan 7 Program dan 60 kegiatan. Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 29.883.804.629,- dari pagu anggaran sebesar Rp32.620.147.406,- sehingga Sekretariat Daerah Kota Cimahi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.736.342.777,- atau 8,39%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 URAIAN SINGKAT ORGANISASI	2
1.2.1 Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah	2
1.2.2 Struktur Organisasi	6
1.2.3 Sumber Daya Organisasi	8
1.3 ISU STRATEGIS	10
1.4 DASAR HUKUM	17
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	19
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	19
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	24
2.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	26
2.4 PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III : PENGUKURAN KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	31
3.2 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA	36
3.2.1 Indikator Nilai AKIP Kota.....	36
3.2.2 Indikator Nilai LPPD.....	37
3.2.3 Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.....	38
3.2.4 Indikator Nilai Rata-rata IKM Kota.....	39

3.3 ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	40
3.3.1 Anggaran.....	40
3.3.2 Sumber Daya Manusia.....	40
3.4 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.....	40
3.5 REALISASI ANGGARAN.....	54
BAB IV : PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH.....	8
Tabel 1.2	KOMPOSISI ASN SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN GOLONGAN.....	9
Tabel 1.3	KOMPOSISI ASN SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	9
Tabel 1.4	KOMPOSISI THL SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	9
Tabel 1.5	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI.....	13
Tabel 2.1	TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN SEKRETARIAT DAERAH.....	19
Tabel 2.2	SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA SEKRETARIAT DAERAH.....	20
Tabel 2.3	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH.....	22
Tabel 2.4	TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SEKRETARIAT DAERAH SEBELUM DAN SETELAH REVIU RENSTRA TAHUN 2019.....	25
Tabel 2.5	PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH.....	26
Tabel 2.6	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH.....	30
Tabel 3.1	REALISASI SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019.....	31
Tabel 3.2	KOMPONEN PENILAIAN AKIP.....	32
Tabel 3.3	KOMPONEN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI.....	33
Tabel 3.4	HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN PUBLIK KOTA CIMAHI TAHUN 2019.....	34
Tabel 3.5	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019.....	41
Tabel 3.6	REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Instansi Kinerja Pemerintah (LKIP).

LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 ini disusun sebagai upaya evaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi¹ sepanjang Tahun 2019 dan upaya perbaikan kinerja untuk tahun-tahun mendatang dengan memegang prinsip akuntabilitas yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai tolak ukur perbaikan kinerja dan bahan evaluasi yaitu Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LKIP Sekretariat Kota Cimahi Tahun 2018 oleh Inspektorat Kota Cimahi memperoleh nilai 63,91 dengan predikat B.

¹ Sekretariat Daerah Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016) dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 382 Tahun 2017).

I.2. URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Cimahi, merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

I.2.1 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Sekretariat Daerah
Memimpin, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
- b. Fungsi Sekretariat Daerah
 1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dan ketentuan yang berlaku.
- c. Uraian Tugas Sekretariat Daerah
 1. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya;
3. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Merumuskan bahan kebijakan pemerintah kota lingkup Sekretariat Daerah;
5. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli, Setwan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan agar sinergis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
7. Mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Kota meliputi Staf Ahli, Setwan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
9. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
10. Menyelenggarakan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan daerah;
11. Melaksanakan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

12. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota (LKPJ), ILPPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tingkat Sekretariat Daerah dan Tingkat Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
13. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Wali Kota;
17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretaris Daerah maka disusunlah struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi yang terdiri dari:

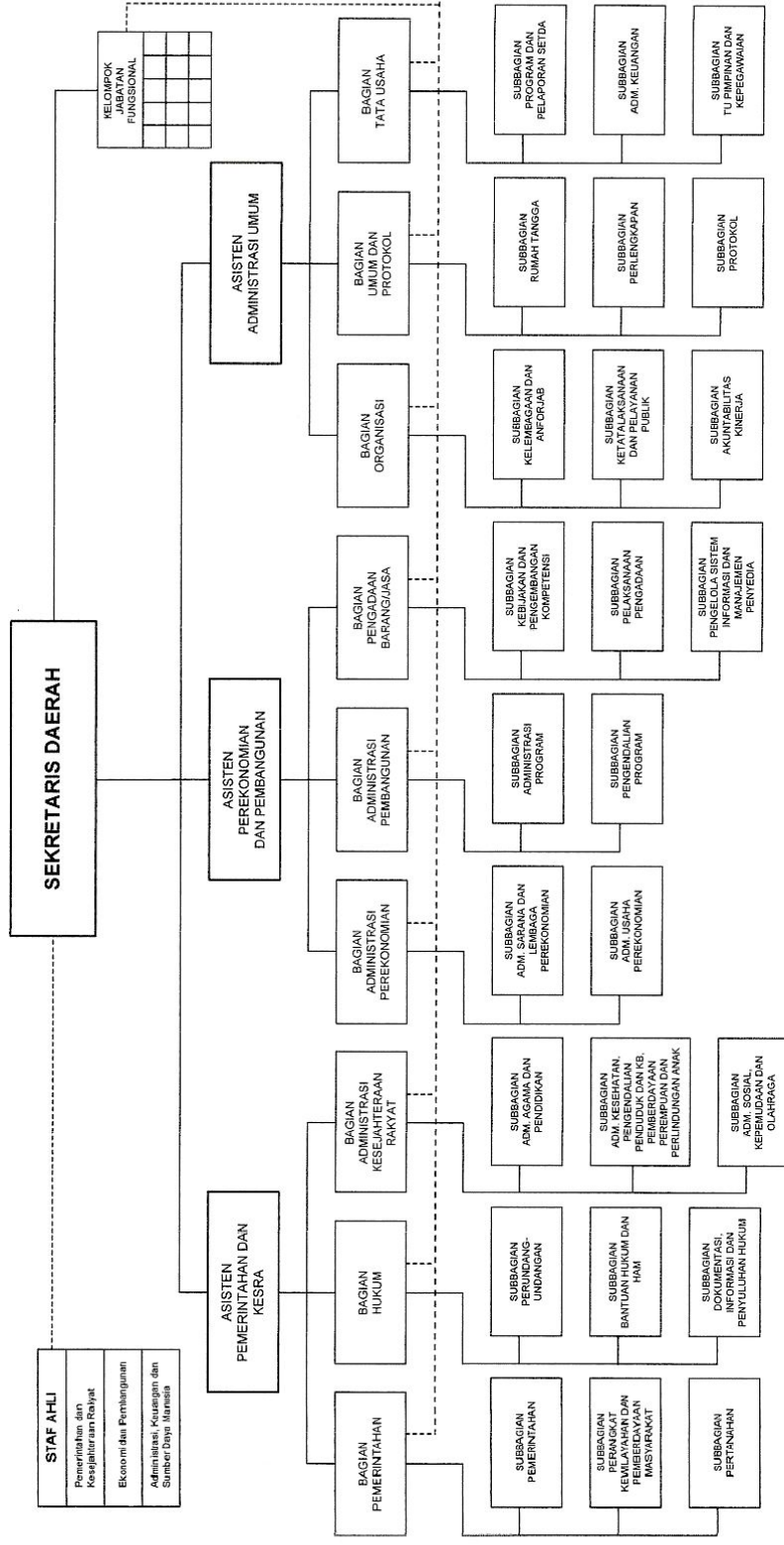
1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Perangkat Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Sub Bagian Pertanahan.
 - b. Bagian Hukum :
 - 1) Sub Bagian Perundang – undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum.
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Agama dan Pendidikan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Sosial, Kepemudaan dan Olahraga
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Usaha Perekonomian.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program.
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 1) Sub Bagian Advokasi dan Pembinaan Pengadaan;
 - 2) Sub Bagian Informasi, teknologi Pengadaan;
 - 3) Sub Bagian Pelayanan Pengadaan;

4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - a. Bagian Organisasi :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - 3) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian TU Pimpinan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Keuangan.
 - c. Bagian Umum dan Protokol:
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Protokol.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

I.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI



I.2.3 Sumber Daya Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Cimahi memiliki sumber daya aparat/personil dengan total keseluruhan sebanyak 222 orang (data per Desember 2019) yang terdiri dari 142 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 80 Tenaga Harian Lepas (THL) dengan potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Berikut rincian jumlah aparatur berdasarkan unit kerja, golongan dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

No	UNIT KERJA	PNS	THL	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Staf Ahli	3	-	3
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	1	-	1
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-
5	Asisten Administrasi Umum	1	-	1
6	Bagian Pemerintahan	11	-	11
7	Bagian Hukum	13	-	13
8	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	8	4	12
9	Bagian Adm. Perekonomian	6	-	6
10	Bagian Adm. Pembangunan	5	-	5
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	19	-	19
12	Bagian Organisasi	9	-	9
13	Bagian Tata Usaha	31	5	36
14	Bagian Umum dan Protokol	33	71	104
	J U M L A H	142	80	222

Sumber: Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel 1.2
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	14
III	95
II	33
JUMLAH	142 orang

Tabel 1.3
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Golongan	Jumlah	Persen
S3	1	0,70
S2	28	19,72
S1	53	37,32
D4	10	7,04
D3	18	12,68
SMA/SMK	27	19,01
SMP	2	1,41
SD	3	2,11
JUMLAH	142 orang	100

Tabel 1.4
Komposisi THL Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Golongan	Jumlah	Persen
S1	7	8,75
D4	1	1,25
D3	5	6,25
SMA/SMK	58	72,50
SMP	6	7,50
SD	3	3,75
JUMLAH	80 orang	100

I.3. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang yang mana apabila tidak diantisipasi dapat menghambat pencapaian target kinerja.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, beberapa isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah Kota Cimahi diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia sebagai aparatur pemerintahan masih dianggap kurang memadai dalam penempatan jabatannya, baik secara kualitas maupun kuantitas dan tingkat pendidikan;
2. Kebijakan alokasi anggaran belum berorientasi kepada pendudukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan program/kegiatan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik belum mendapat perhatian secara seksama terutama dalam penguatan regulasi dan upaya pencapaian standar pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk mengevaluasi kinerja adalah dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2019 ini dengan target Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dari perbandingan tersebut, di Tahun Anggaran 2019 dari 60 kegiatan yang dilaksanakan dilingkup Sekretariat Daerah, terdapat 22 kegiatan yang berada di bawah target Renstra. Data dapat dilihat pada tabel 1.5.

Beberapa penyebab tidak tercapainya target Renstra pada tahun 2019 ini antara lain:

1. Rasionalisasi anggaran.

Hal ini berdampak pada semua Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak terkecuali Sekretariat Daerah.

2. Target Indikator kinerja yang sulit diprediksi.

Seperti yang terjadi pada Kegiatan Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah, dimana indikator kegiatannya (jumlah surat masuk dan surat keluar) baik yang datang dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dari Kementerian/Badan/ Lembaga Pemerintahan, instansi vertikal bahkan dari masyarakat sulit untuk diprediksi jumlahnya, sehingga capaiannya kurang tepat sasaran dengan target Renstra.

3. Perbedaan indikator kinerja antara Renstra dan Rencana penganggaran.

Sebagai Contoh untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik KDH dan Wa.KDH pada Bagian Umum dan Protokol, indikator kinerja dalam Renstra adalah jumlah bulan, sementara indikator kinerja dalam dokumen perencanaan penganggaran Tahun 2019 adalah jumlah paket. Perbedaan indikator tersebut mengakibatkan perbedaan jumlah target yang cukup jauh, yakni 12 bulan (target Renstra) dan 4 paket (target Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019), sehingga bila dihitung secara langsung, kinerja kegiatan tersebut jauh di bawah 100%.

4. Kendala Teknis.

Hal ini terdapat pada Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya pada Bagian Hukum, di mana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Cimahi dapat direalisasikan bila melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)/Kemenkumham RI sebagai syarat terselenggaranya bantuan tersebut, dan yang menjadi kendala adalah di Kota Cimahi belum ada organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh BPHN/Kemenkumham sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum dapat dilaksanakan.

5. Kendala pendataan.

Hal ini terjadi pada beberapa kegiatan antara lain Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian dan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Bagian Administrasi perekonomian. Pada kegiatan Fasilitas Koordinasi Administrasi Perekonomian, kendalanya adalah sulit untuk mendapat akses data dari Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Cimahi. Ketidaktersediaan data mengakibatkan tidak dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga sulit mencapai target kinerja yakni tersedianya laporan monitoring Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara pada kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif, kendalanya adalah pendataan mengenai pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Cimahi.

Tabel. 1.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019
Dengan target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran) Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Perangkat Daerah kabupaten/ kota Tahun Ke	Realisasi Capaian Tahun Ke	Rasio Capaian pada Tahun ke	Unit Penanggung Jawab
1	Meningkatkan/ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen laporan RANHAM, Jumlah dokumen penilaian Kota Peduli HAM, Jumlah rakor sosialisasi RANHAM (kali)	1	0.50	50.00%	Bag. Hukum
			Jumlah rakor sosialisasi RANHAM (kali)	1	0	0%	Bag. Hukum
		Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat, Jumlah legal memorandum, Jumlah pembahasan permasalahan hukum , Jumlah penanganan permasalahan hukum (kasus), Jumlah pendampingan saksi --> paket	1	0.77	77.08%	Bag. Hukum
			Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat	5	0	0%	Bag. Hukum
			Jumlah legal memorandum	6	2	33%	Bag. Hukum
			Jumlah cetak buku perda (paket)	2	1	50%	Bag. Hukum
			Jumlah cetak ulang buku perda (paket)	1		0%	Bag. Hukum
			Jumlah himpunan produk hukum daerah (buku)	3		0%	Bag. Hukum
		Penyediaan Bahan Logistik KDH dan Wa.KDH	Jumlah bulan penyediaan logistik/ e reporting: jumlah paket	12	4	33.33%	Bag. Umprot

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran) Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Perangkat Daerah kabupaten/ kota Tahun Ke	Realisasi Capaian Tahun Ke	Rasio Capaian pada Tahun ke	Unit Penanggung Jawab
		Penyediaan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti KDH dan Wa.KDH	Jumlah bulan penyediaan tenaga pengemudi dan pramubakti	12	10	83.33%	Bag. Umprot
		Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	48	24	50.00%	Bag. Umprot
		Facilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian	a. Cakupan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian (kali) b. Dokumen Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah (buah) c. Jumlah BUMD yang dimonitoring (buah) d. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Program CSR/TJSL (buah) --> paket	1	0.18	17.86%	Bag. Admirek
		Facilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kebijakan/ jumlah saran/ rekomendasi	3	1	33.33%	Bag. Admirek
		Pengembangan Kebijakan dan Program	Penyusunan Kebijakan Bela Beli (tidak ada di renstra)- dokumen	0	1	-	Bag. Admirek
		Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Lembaga Keuangan Yang Melaksanakan MOU	2	0	0.00%	Bag. Admirek
		Penataan Batas Wilayah	Persentase penegakan batas daerah yang telah diidentifikasi/ e reporting: jumlah dokumen penegasan batas wilayah	3	1	33.33%	Bag. Pemerintahan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran) Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/ kota Tahun Ke	Realisasi Capaian Tahun Ke	Rasio Capaian pada Tahun ke	Unit Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RW yang dibina/ e reporting: jumlah kegiatan pembinaan administrasi lembaga kemasyarakatan	312	4	1.28%	Bag. Pemerintahan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	Jumlah pegawai/ jumlah kegiatan/ E reporting: persentase ASN	200	100	50.00%	Bag. TU
		Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	Jumlah kegiatan	1	0	0.00%	Bag. Umprot
		Facilitasi Persuratan Pimpinan Daerah	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	32.000	30,720	96.00%	Bag. TU
		Pengadaan Dan Pemeliharaan Meubeleur Kantor	Jumlah paket	1	-	0.00%	Bag. Umprot
		Pengadaan Seragam Pegawai	Jumlah set seragam pegawai	144	-	0.00%	Bag. Umprot
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah orang	42	31	73.81%	Bag. Umprot
		Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket	4	3	75.00%	Bag. Umprot

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran) Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/ kota Tahun Ke	Realisasi Capaian Tahun Ke	Rasio Capaian pada Tahun ke	Unit Penanggung Jawab
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan.	Jumlah layanan kegiatan keagamaan	38	20	52.63%	Bag. Kesra
		Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan	6010	5980	99.50%	Bag. Kesra
		Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga.	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang kepemudaan dan olahraga	19	16	84.21%	Bag. Kesra
		Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang pengendalian penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	14	8	57.14%	Bag. Kesra
		Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang sosial kemasyarakatan	15	14	93.33%	Bag. Kesra

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, beberapa hal yang rencanakan di Tahun 2020 untuk mengantisipasi ketidaktercapaian target Renstra diantaranya:

1. Review Renstra Sekretariat Daerah 2017-2022.

Hal ini dilakukan untuk penyesuaian indikator kinerja serta target capaian kinerja.

2. Penyusunan rencana penganggaran yang berbasis pada kebutuhan.
3. Bagian Hukum akan memfasilitasi setiap organisasi bantuan hukum yang ada di Kota Cimahi untuk bisa mendapatkan akreditasi dari BPHN/Kemenkumham. Dengan adanya organisasi bantuan hukum di Kota Cimahi yang telah terakreditasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tinggal di Kota Cimahi.
4. Koordinasi dengan lintas sektoral untuk data yang lebih akurat agar tepat sasaran.

I.4 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 ini memperhatikan kepada Peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB.I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Uraian Singkat Organisasi
 - I.2.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
 - I.2.2 Struktur Organisasi
 - I.2.3 Sumber Daya Organisasi
- I.3 Isue Strategis
- I.4 Dasar Hukum
- I.5 Sistematika Penulisan

BAB.II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
 - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Program, Kegiatan Dan Pendanaan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

BAB.III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
 - 3.2.1 Indikator Nilai AKIP Kota
 - 3.2.2 Indikator Nilai LPPD
 - 3.2.3 Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
 - 3.2.4 Indikator Nilai Rata-rata IKM Kota
- 3.3 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya
 - 3.3.1 Anggaran
 - 3.3.2 Sumber Daya Manusia
- 3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB.IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas dan fungsinya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Mengacu Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah berdasarkan dokumen Renstra 2017-2022 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	
3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender	

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah	Nilai LPPD	ST	ST	ST	ST	ST
2	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Survey kepuasan masyarakat	78 SKM	80 SKM	82 SKM	84 SKM	86 SKM
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	B	BB	BB	A	A
5	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	8,3%	7,5%	6,8%	6,6%	5,3%
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	80%	80%	80%	80%	80%

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya			
Misi 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan pemerintah daerah	1. Peningkatan Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah 2. Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintah
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah		1. Peningkatan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 2. Penataan kewilayahan dan penyelesaian konflik pertanahan 3. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah 4. Fasilitasi kegiatan keagamaan 5. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi kebijakan perekonomian 6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan 7. Terbentuknya suatu produk hukum dan kesesuaian produk hukum terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi 8. Fasilitasi penyelesaian atau penanganan permasalahan hukum
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

Misi 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Menurunnya kemiskinan	Menjaga Ketersediaan Pangan serta meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat	Fasilitasi penyusunan bahan kebijakan perberasan
Misi 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

Dalam perjalanannya, Renstra mengalami reviu seiring dengan revisi RPJMD dimana terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah berikut dengan target capaiannya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN RB Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebelum dan setelah dilaksanakannya reviu Renstra Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022
Sebelum dan Setelah Reviu Tahun 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	
			SEBELUM REVIU	SETELAH REVIU	SEBELUM REVIU	SETELAH REVIU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	-	Nilai LPPD	-
			2. Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	Opini BPK	-
			3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata IKM Kota
			4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah	SAKIP	Nilai AKIP Kota
						Nilai LPPD
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi		-	-	-	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
			5. Menurunnya Kemiskinan	-	Angka Kemiskinan	-
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender		6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	

2.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai (*outcome*) suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan kedalam program, kegiatan dan pendanaan.

Berikut data program, kegiatan dan pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Kota Cimahi Tahun 2019

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Tahun 2019

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.434.765.738
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	156.786.550
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air	1.316.165.000
	Penyediaan Media Massa, Barang Cetak Dan Penggandaan	269.832.104
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2.759.280.000
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	997.696.800
	Penyediaan Gudang Kantor	138.000.000

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	3.166.547.400
	Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan	966.147.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.105.541.416
	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas	3.341.718.968
	Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah	1.007.691.000
	penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	118.089.500
	penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	91.270.000
2	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	25.296.000
	Pelaksanaan Desk Pilkada	25.296.000
3	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	15.417.246.668
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	283.261.000
	Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadaan	152.251.000
	Pelayanan Pengadaan	373.268.663
	Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan	136.165.000
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	274.587.275
	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah	79.509.500
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	533.404.000
	Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik	309.873.700
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	153.500.000

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan	89.000.000
	Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	186.700.000
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	91.200.000
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	386.308.000
	Fasilitasi /Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik	320.000.000
	Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian	159.143.000
	Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	86.422.000
	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	72.433.000
	Penataan Kelembagaan	403.500.300
	Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama	718.529.000
	Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan	1.269.292.200
	Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan	486.528.000
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	195.860.970
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260.514.700
	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	430.192.025
	Evaluasi Dan Pelaporan	362.000.000
	Fasilitasi Kebijakan Pangan	142.110.000
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	516.497.000
	Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	47.231.805
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat	212.790.000
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	230.040.000

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	143.100.000
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	216.520.000
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.793.275.000
	Penyediaan Rumah Dinas Kdh Dan Wakdh	708.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik KDH Dan Wa.KDH	809.112.250
	Penyediaan Tenaga Pengemudi Dan Pramubakti KDH Dan Wa.KDH	428.860.176
	Penyediaan Seragam Beserta Perlengkapannya KDH Dan Wa.KDH	121.860.000
	Fasilitasi Kegiatan Harian Dan Hari Besar	2.234.407.104
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	385.304.000
	Penyusunan Laporan Keuangan	288.233.000
	Penyusunan Renstra Dan Renja PD	36.740.000
	Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP Dan LPPD PD	60.331.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	228.088.000
	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	228.088.000
6	Program Pengelolaan Pertanahan	394.840.000
	Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan	130.000.000
	Penataan Batas Wilayah	264.840.000
7	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	609.607.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	584.607.000
	Pembinaan Administrasi Kmbaga Kemasyarakatan	25.000.000
	J U M L A H	32.620.147.406

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kota	Nilai B
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM Kota	Nilai 80

No	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 15.434.765.738,-
2.	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Rp. 25.296.000,-
3.	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	Rp. 15.417.246.668,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 385.304.000,-
5.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp. 228.088.000,-
6.	Program Pengelolaan Pertanahan	Rp. 394.840.000,-
7.	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	Rp. 734.607.000,-
J U M L A H		Rp. 32.620.147.406,-

BAB III PENGUKURAN KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dengan realisasinya.

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
			1		2		3	4	5
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP Kota	B	B Nilai 60,68	BB	B Nilai 63,99	A	A	A
		Nilai LPPD	ST	ST Nilai 3,3274	ST	ST Nilai 3,3590	ST	ST	ST
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi							
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Rata-rata IKM Kota	78	80,99 16 UPP	80	80,75 48 UPP	82	84	86

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Tahun 2019 belum semua indikator sasaran dapat terealisasi.

Realisasi masing-masing indikator sasaran diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi indikator Nilai AKIP Kota Tahun 2019 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2018.

Tabel.3.2
Komponen Penilaian AKIP

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1. Perencanaan Kinerja	35	22.63
2. Pengukuran Kinerja	20	17.26
3. Pelaporan Kinerja	15	7.02
4. Evaluasi Internal	10	6.40
5. Capaian Kinerja	20	10.68
Nilai Hasil Evaluasi	100	63.99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B

- b. Realisasi indikator Nilai EKPPD Kota Tahun 2019 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi Tahun 2018. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu:

1. Indeks Capaian Kinerja (ICK) dengan bobot 95%
2. Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dengan bobot 5%.

Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD) dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah). Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan,

gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- c. Realisasi indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel.3.3
Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
I. KOMPONEN PENGUNGKIT		
1. Manajemen Perubahan	5,00	1,71
2. Penataan Peraturan Per-UU	5,00	1,66
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,51
4. Penataan Tata Laksana	5,00	2,71
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	9,18
6. Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,88
7. Penguatan Pengawasan	12,00	4,36
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,99
Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	28,99
I. KOMPONEN HASIL		
1. Nilai AKuntabilitas Kinerja	14,00	8,42
2. Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	0,00
3. Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	3,97
4. Opini BPK	3,00	3,00
5. Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,17
Total Komponen Hasil (B)	40,00	23,07
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	52,06

d. Realisasi indikator Nilai Rata-Rata IKM Kota diperoleh dari

Formula indeks pelayanan publik:

$$\frac{\sum \text{skor IKM Unit Pelayanan Publik (UPP)}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

Tabel 3.4
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
Kota Cimahi Tahun 2019

No	UPP	HASIL PENGUKURAN IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1	DPMPTSP	80,90	B	Baik
2	DISKOMINFOARPUS	79,87	B	Baik
3	DINSOSP2KBP3A	81,49	B	Baik
4	DISNAKER	84,42	B	Baik
5	DINKES	88,68	A	Sangat Baik
6	DISDUKCAPIL	84,38	B	Baik
7	DISDIK	84,00	B	Baik
8	DISHUB	76,71	B	Baik
9	BAPPEDA	77,60	B	Baik
10	BAPPENDA	77,43	B	Baik
11	BPKAD	78,64	B	Baik
12	BKPSDMD	77,00	B	Baik
13	RSUD CIBABAT	80,64	B	Baik
14	KANTOR KESBANG	84,86	B	Baik
15	KEC. CIMAHI UTARA	90,80	A	Sangat Baik
16	KEC. CIMAHI TENGAH	77,27	B	Baik
17	KEC. CIMAHI SELATAN	84,75	B	Baik
18	KEL. CIPAGERAN	83,63	B	Baik
19	KEL. PADASUKA	81,67	B	Baik
20	KEL. CIBEBER	83,69	B	Baik
21	KEL. CITEUREUP	78,41	B	Baik
22	KEL. KARANGMEKAR	78,07	B	Baik
23	KEL. CIMAHI	81,03	B	Baik
24	KEL. CIBABAT	84,13	B	Baik
25	UPTD PUSKESMAS CIMAHI UTARA	76,27	C	Cukup

No	UPP	HASIL PENGUKURAN IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA
26	UPTD PUSKESMAS CITEUREUP	77,40	B	Baik
27	UPTD PUSKESMAS PASIRKALIKI	79,40	B	Baik
28	UPTD PUSKESMAS PADASUKA	78,08	B	Baik
29	UPTD PUSKESMAS CIGUGUR	77,60	B	Baik
30	UPTD PUSKESMAS CIMAHI SELATAN	81,25	B	Baik
31	UPTD PUSKESMAS CIBEUREUM	80,11	B	Baik
32	UPTD PUSKESMAS LEUWIGAJAH	78,28	B	Baik
33	UPTD PUSKESMAS MELONG TENGAH	77,00	B	Baik
34	UPTD PUSKESMAS MELONG ASIH	74,07	C	Cukup
35	UPTD PUSKESMAS CIBEBER	78,70	B	Baik
36	UPTD METEOROLOGI LEGAL	85,75	B	Baik
37	UPTD CIMAHI TECHNOPARK	78,87	B	Baik
38	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	85,03	B	Baik
39	UPTD PASAR KOTA	77,90	B	Baik
40	UPTD PUSKESWAN	81,47	B	Baik
41	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR	81,50	B	Baik
42	BAGIAN TATA USAHA SETDA	79,75	B	Baik
43	BAGIAN ORGANISASI SETDA	80,91	B	Baik
44	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA	82,51	B	Baik
45	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	80,25	B	Baik
46	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA SETDA	77,43	B	Baik
47	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETDA	84,88	B	Baik
48	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA	82,56	B	Baik
	NILAI IKM	80,75	B	BAIK

3.2 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Analisis dilakukan terhadap indikator sasaran Sekretaris Daerah sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

3.2.1 Indikator Nilai AKIP Kota

Realisasi masih dibawah target dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Perumusan Sasaran Strategis pada RPJMD maupun Renstra belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja *outcome* yang diharapkan akan dicapai;
2. Masih terdapat rumusan indikator kinerja yang tidak relevan mengukur keberhasilan sasaran pembangunan baik pada level Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah;
3. Mekanisme *cascade* kinerja tidak berpedoman pada proses bisnis organisasi dimana penyusunan IKU tidak memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan RPJMD maupun RKP serta tugas fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;
4. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
5. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih memantau pencapaian *output* dan penyerapan anggaran;
6. Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja tidak berjalan optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja tidak efektif memicu berbagai perbaikan yang diperlukan.

Usaha yang dilakukan untuk mencapai target diantaranya:

1. Melakukan reviu secara ringkas terhadap RPJMD dan Renstra PD untuk lebih memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, memperhatikan keterpaduan perencanaan serta telah melakukan *cascade* kinerja;
2. *Cascade* kinerja dibangun berdasarkan proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD sehingga penyusunan IKU akan mengacu kepada *cascade* kinerja tersebut;
3. Melakukan integrasi sistem perencanaan kinerja, sistem penganggaran dan informasi kinerja, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas capaian kinerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya pada pencapaian output kegiatan dan penyerapan anggaran namun juga evaluasi program untuk memastikan bahwa program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien sebagai upaya pencapaian sasaran strategis maupun sasaran pembangunan kota;
6. Mendorong penyusunan indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.

3.2.2 Indikator Nilai LPPD Kota

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi Tahun 2018 diperoleh indeks EKPPD adalah 3,3590. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil

indeks tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4).

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
2. Melaksanakan desk pencermatan IKK;
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri.

3.2.3 Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Realisasi masih dibawah target dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum mampu mengidentifikasi indikator dan target keberhasilan dari setiap area perubahan sehingga percepatan reformasi birokrasi belum optimal;
2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) belum dilakukan secara optimal untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Kota Cimahi;
3. Pembentukan struktur organisasi yang berjalan saat ini, belum sepenuhnya mempertimbangkan proses bisnis dan kinerja yang akan diwujudkan;
4. Pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja yang ingin diwujudkan. Penetapan standar kompetensi SDM yang berbasis kinerja dan pengisian jabatan oleh aparatur yang memenuhi standar kompetensi sangat diperlukan untuk mewujudkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Usaha yang dilakukan untuk mencapai target diantaranya:

1. Menetapkan indikator dan target keberhasilan masing-masing area perubahan sehingga hasil yang akan dicapai dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat Kota Cimahi;
2. Meningkatkan implementasi PMPRB dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan para pokja untuk dapat memantau dengan baik perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
3. Melakukan evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan dalam proses bisnis;
4. Mereviu standar kompetensi pegawai yang didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi.
5. Menetapkan kebijakan studi tiru pada unit kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja percontohan zona integritas;
6. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundangan untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan alasan ditiapkannya peraturan tersebut;
7. Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai sehingga pelaksanaan RB lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh stakeholder;
8. Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

3.2.4 Indikator Nilai Rata-Rata IKM Kota

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 80 tercapai 80,75. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik.

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan public;
2. Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
3. Pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP dan SPM;
4. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

3.3 ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

3.3.1 Anggaran

Untuk mencapai target empat indikator sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Cimahi mengalokasikan belanja langsung Tahun 2019 sebesar Rp.32.620.147.406,-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.29.883.804.629,- atau 91,61%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Cimahi telah melakukan efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp.2.736.342.777,- atau 8,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar 89,89% ada peningkatan sebesar 1,72%.

3.3.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per tahun 2019 jumlah personil di Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 222 orang, dengan rincian 142 orang ASN dan 80 orang THL. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi anjab pada masing-masing Bagian/Unit Kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi.

3.4 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 dan 2019

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke			Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2018	2019	2019	2018	2019		
1	MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH	FASILITASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)	Jumlah dokumen laporan Rarham, Jumlah dokumen penilaian Kota Peduli HAM, Jumlah rakor sosialisasi Rarham (kali)	4	6	5	5	5	Bag. Hukum	Tetap
		FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah penyuluhan hukum	17	17	17	17	17	Bag. Hukum	tetap
		KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAERAH	Jumlah kajian	3	3	3	3	3	Bag. Hukum	tetap
		LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- Jumlah keputusan dan workshop - Jumlah Peraturan Walikota - Jumlah Raperda	745	1573	3,176	2,610	2,610	Bag. Hukum	Percepatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke	Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA	- Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat, - Jumlah legal memorandum, - Jumlah pembahasan permasalahan hukum , - Jumlah penanganan permasalahan hukum (kasus), - Jumlah pendampingan saksi	45	44	64	Bag. Hukum	Percepatan
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- Jumlah sosialisasi hukum, - Jumlah cetak bahan publikasi perundang-undangan, - Jumlah cetak bahan publikasi perundang-undangan), - Jumlah cetak buku perda, - Jumlah cetak ulang buku perda, - Jumlah himpunan produk hukum daerah, - Jumlah website yang dipelihara	4	10	24	Bag. Hukum	Perlambatan
		PELAYANAN PENGADAAN	Jumlah bulan	12	12	12	Bag. PBJ	Tetap
		PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PENGADAAN	Jumlah bulan	12	12	12	Bag. PBJ	Tetap

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADAAN	Jumlah bulan	12	12	12	12	Bag. PBJ	Tetap
		DIALOG / AUDIENSI DENGAN TOKOH MASYARAKAT	Jumlah dialog	78	78	78	78	Bag. Umprot	Tetap
		FASILITASI KEGIATAN HARIAN DAN HARI BESAR	Persentase kegiatan yang difasilitasi	100%	100%	-	134	Bag. Umprot	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
		KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	165	165	165	165	Bag. Umprot	Tetap
		KUNJUNGAN KERJA /INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah inspeksi	48	48	48	48	Bag. Umprot	Tetap
		PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEM BAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI	Jumlah kunjungan	48	25	25	25	Bag. Umprot	Tetap

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KDH DAN WAKDH	Jumlah bulan penyediaan logistik	12	12			Bag. Umprot	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			jumlah paket			4	4		
		PENYEDIAAN TENAGA PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI KDH DAN WAKDH	Jumlah THL pengemudi dan pramubakti			12	10	Bag. Umprot	kegiatan tidak ada di tahun 2018
		RAPAT KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Rapat Koordinasi	48	48	24	24	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA	Jumlah dokumen standar belanja/ e reporting (analisa standar belanja+ standar biaya belanja+tunjangan kinerja)	1	3	3	3	Bag. Adbang	Tetap
			Jumlah bulan	12	12	12	12		
		EVALUASI DAN PELAPORAN						Bag. Adbang	Tetap

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke	Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		FASILITASI KOORDINASI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	a. Jumlah Rekomendasi b. Dokumen Kebijakan c. Jumlah monitoring BUMD d. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Program CSR/TJSL	60 77	60 60	Bag. Admirek	Tetap
		FASILITASI KEBIJAKAN PANGAN 2018: MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PERBERASAN , sasaran: MENURUNNYA KEMISKINAN	Monitoring penerima Bantuan Pangan Non Tunai / jumlah penduduk yang terlayani program bantuan pangan non tunai Jumlah Monev Penyaluran Pangan Pusat dan Daerah	20.434 20.434	 12	Bag. Admirek	tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
		FASILITASI KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kebijakan/ jumlah saran/ rekomendasi Jumlah Monitoring Pelaku Usaha Ekonomi kreatif	100% 3	 1 1	Bag. Admirek	tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke	Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL	Jumlah laporan hasil rakor dan hasil money (dokumen)	-		Bag. Admirek	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			Jumlah Lembaga Keuangan Yang Melaksanakan MOU		1		
		FASILITASI / PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	Jumlah Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerjasama / NHPD yang dibahas di forum TTKSD	465	415	Bag. Pemerintahan	Percepatan
		PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	jumlah koordinasi yang difasilitasi	10	10	Bag. Pemerintahan	Tetap
		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	Jumlah dokumen	3	3	Bag. Pemerintahan	Tetap
		FASILITASI KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	jumlah sengketa tanah yang diselesaikan	4	1	Bag. Pemerintahan	percepatan
		PENATAAN BATAS WILAYAH	jumlah dokumen penegasan batas wilayah	3	3	Bag. Pemerintahan	Perlambatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke	Unit Penanggung Jawab	Keterangan
2	MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN DESK PILKADA	jumlah desk pilkada	1	1	0	Bag. Pemerintahan	percepatan
		FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah lokasi yang ditangani BBGRM dan BSMSS	2	2	2	Bag. Pemerintahan	Tetap
		PEMBINAAN ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah RW yang dibina	312	312	-	Bag. Pemerintahan	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
4	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	jumlah kegiatan pembinaan administrasi lembaga kemasyarakatan	-	-	312	Bag. Org	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			Jumlah dokumen SAKIP, dokumen SPM, dok ev jabatan, dok roadmap reformasi birokrasi	100%	100%	100%	Bag. Org	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			- Jumlah Dokumen AKIP - Jumlah Kegiatan Reformasi Birokrasi yang Difasilitasi - Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan			9	Bag. Org	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		PENATAAN KELEMBAGAAN	- Jumlah dokumen kajian kelembagaan, - Jumlah dokumen analisis jabatan	B Nilai 100%			Bag. Org	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			- Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan - Jumlah Dokumen Analisis Jabatan		B nilai 3 dok			
		PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Jumlah Dokumen Pelayanan Publik, - Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan	100%			Bag. Org	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			- Jumlah Dokumen SOP - Jumlah Dokumen Standar Pelayanan - Jumlah Dokumen IKM Perangkat Daerah		100%	3 dok		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah pegawai/ jumlah kegiatan	-	185	183	Bag. TU	Tahun 2018 kegiatan tidak ada

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen	-	-	9	Bag. TU	Kegiatan tidak ada di Tahun 2018
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen SPP UP-TU-LS/SPM/SP2D	1.650	1.650		Bag. TU	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Setda			2		
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen	-	8	13	Bag. TU	percepatan
		FASILITASI PERSURATAN PIMPINAN DAERAH	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	32.000	32.000	30.720	Bag. TU	perlambatan
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah Pegawai	250	250		Bag. TU	Percepatan
			Jumlah Perjalanan Dinas yang difasilitasi			447		
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Bulan	12	12	12	Bag. TU	Tetap
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan	12	12	12	Bag. TU	Tetap

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan	12	12	97	12	Bag. Umprot	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			Jumlah kendaraan			97	12		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah paket	1	1	-	-	Bag. Umprot	Perlambatan
			Jumlah paket	2	4	2	10		
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah set seragam pegawai	-	144	-	-	Bag. Umprot	Tidak berlanjut di Tahun 2019
			Jumlah set seragam pegawai			22	22		
		PENYEDIAAN SERAGAM BESERTA PERLENGKAPANNYA KADH DAN WA.KDH	Jumlah paket	2	2	2	2	Bag. Umprot	tetap
			Jumlah unit	3	3	3	3		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun Ke	Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah orang	42	42	37	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK/PENERANGAN KANTOR	Jumlah Paket	2	2	3	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	128	128	128	Bag. Umprot	percepatan
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah paket	4	4	3	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah kegiatan yang difasilitasi/jumlah set	1	1		Bag. Umprot	Kegiatan tidak berlanjut di Tahun 2019
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah paket			-	Bag. Umprot	Kegiatan tidak ada di Tahun 2018
6	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PENYEDIAAN RUMAH DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah Unit Rumah Dinas			2	Bag. Umprot	Kegiatan tidak ada di Tahun 2018
		FASILITASI KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN	Jumlah fasilitas kegiatan bidang keagamaan	6	6	30	Bag. Kesra	percepatan
		PELAYANAN KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN.	Jumlah layanan kegiatan keagamaan	101	96	96	Bag. Kesra	perlambatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan	2.763	2.976	5.980	5.980	Bag. Kesra	percepatan
		SINERGITAS PELAKSANAAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang kepemudaan dan olahraga	31	19	16	16	Bag. Kesra	Tetap
		SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang kesehatan	20	36	33	36	Bag. Kesra	percepatan
		SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang pengendalian penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	20	7	16	8	Bag. Kesra	perlambatan
		SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN.	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang sosial kemasyarakatan	28	15	16	14	Bag. Kesra	perlambatan

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi dibandingkan dengan target RPJMD Kota Cimahi di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang mengalami percepatan (capaian kinerja Tahun 2019 lebih besar dari capaian kinerja Tahun 2018), antara lain disebabkan oleh faktor dari luar kewenangan penanggung jawab kegiatan. Misalnya kegiatan Legislasi Rancangan Perundang-Undangan di Bagian Hukum, disebabkan karena Tahun 2019 ada penambahan target Surat Keputusan (SK) yang difasilitasi. Penambahan target jumlah SK yang difasilitasi tersebut tidak hanya berasal dari lingkup Sekretariat Daerah saja namun juga berasal dari Perangkat Daerah di luar Sekretariat Daerah. Faktor lain yang menyebabkan tingginya realisasi dari target adalah, dimulai Tahun 2019, penetapan SK *By Name By Address*, sehingga meskipun SK yang diajukan untuk difasilitasi memiliki kesamaan nomenklatur dan substansi, namun tetap harus dipisahkan penyusunannya berdasarkan nama.

Contoh lainnya di Bagian Hukum adalah Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya. Jumlah kasus yang ditangani pada Tahun 2019 memang lebih besar dari Tahun 2018, artinya dapat dikategorikan sebagai percepatan. Namun, percepatan itu lebih disebabkan oleh jumlah kasus hukum yang memang tidak bisa diprediksi.

2. Kegiatan yang mengalami perlambatan antara lain disebabkan oleh salah satunya juga oleh ketentuan yang berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Contohnya kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang capaian kinerja Tahun 2019 menurun (24) dari capaian kinerja Tahun 2018 (34), yang disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur kegiatan pada Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Publikasi Hukum (DIPH) Bagian Hukum Setda Kota Cimahi.

3. Kegiatan yang kinerjanya tetap lebih disebabkan karena sifat kegiatannya yang bersifat rutin sehingga tidak ada fluktuasi perubahan target kinerja dari tahun ke tahun.
4. Di luar kategori di atas, terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dibandingkan karena terdapat perbedaan indikator antara Tahun 2018 dan Tahun 2019. Contohnya antara lain:
 - Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Perundang-Undangan di bagian Hukum, yang pada tahun 2018 indikator kinerjanya jumlah kegiatan penyuluhan hukum menjadi jumlah peserta penyuluhan hukum;
 - Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pangan di Bagian Administrasi Perekonomian (2019)/ Monev dan Pelaporan Pengendalian Kebijakan Perberasan berbeda indikator kegiatan dari Jumlah penerima Bantuan menjadi Jumlah Dokumen;
 - Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Bagian Administrasi Perekonomian, pada Tahun 2018 indikator kinerjanya persentase, pada Tahun 2019 mengalami perubahan indikator yakni jumlah kegiatan;
 - Kegiatan Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan di Bagian Pemerintahan yang pada Tahun 2018 indikator kinerjanya adalah jumlah RW yang dibina, pada Tahun 2019 menjadi jumlah dokumen/ kegiatan;
 - Kegiatan Akuntabilitas Kinerja di Bagian Organisasi, Tahun 2018 indikatornya persentase berubah menjadi jumlah dokumen/ kegiatan.
5. Kegiatan lainnya tidak dapat dibandingkan karena sifat kegiatannya tidak berkelanjutan terhenti di Tahun 2018.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 sebesar Rp.32.620.147.406,- dengan rincian realisasi per kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah
Tahun 2019

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.434.765.738	13.970.160.404	90.51
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	156.786.550	156.772.980	99.99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air	1.316.165.000	1.165.969.863	88.59
	Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan	269.832.104	266.526.500	98.77
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2.759.280.000	1.881.791.112	68.19
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	997.696.800	847.953.060	84.99
	Penyediaan Gudang Kantor	138.000.000	131.000.000	94.92
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	3.166.547.400	3.156.979.846	99.69
	Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan	966.147.000	887.002.324	91.81
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.105.541.416	1.101.512.608	96.18
	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas	3.341.718.968	3.201.713.355	95.81
	Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah	1.007.691.000	970.714.996	96.33
	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Kantor	118.089.500	113.304.260	95.95
	Penyediaan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	91.270.000	88.919.500	97.42
2	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	25.296.000	19.381.500	76.61
	Pelaksanaan Desk Pilkada	25.296.000	19.381.500	76.61

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
3	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	15.417.246.668	14.404.808.535	93.43
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	283.261.000	243.380.327	85.92
	Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadaan	152.251.000	131.258.568	86.21
	Pelayanan Pengadaan	373.268.663	365.383.935	97.88
	Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan	136.165.000	123.540.000	90.72
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	274.587.275	237.689.475	86.56
	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah	79.509.500	79.220.958	99.63
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	533.404.000	517.128.951	96.95
	Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik	309.873.700	288.130.603	92.98
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	153.500.000	150.771.658	98.22
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan	89.000.000	88.698.000	99.66
	Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	186.700.000	182.473.703	97.74
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	91.200.000	90.180.000	98.88
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	386.308.000	382.581.199	99.03
	Fasilitasi /Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik	320.000.000	303.510.000	94.84

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian	159.143.000	136.056.609	85.49
	Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	86.422.000	83.113.300	96.17
	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi LoKal	72.433.000	53.882.794	74.38
	Penataan Kelembagaan	403.500.300	396.943.244	98.37
	Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama	718.529.000	716.384.400	99.70
	Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan	1.269.292.200	1.232.463.704	97.09
	Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan	486.528.000	483.458.418	99.37
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	195.860.970	195.443.596	99.78
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260.514.700	225.173.884	86.43
	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	430.192.025	327.310.092	76.08
	Evaluasi Dan Pelaporan	362.000.000	322.175.850	88.99
	Fasilitasi Kebijakan Pangan	142.110.000	136.330.000	95.94
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	516.497.000	475.115.443	91.98
	Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	47.231.805	29.472.619	62.39
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat	212.790.000	203.418.850	95.59
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	230.040.000	187.254.210	81.40
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	143.100.000	99.300.000	69.39

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	216.520.000	194.755.000	89.94
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.793.275.000	1.509.745.135	84.19
	Penyediaan Rumah Dinas Kdh Dan Wakdh	708.000.000	708.000.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik KDH Dan Wa.KDH	809.112.250	804.754.320	99.40
	Penyediaan Tenaga Pengemudi Dan Pramubakti KDH Dan Wa.KDH	428.860.176	349.395.330	81.47
	Penyediaan Seragam Beserta Perlengkapannya KDH Dan Wa.KDH	121.860.000	121.440.000	99.65
	Fasilitasi Kegiatan Harian Dan Hari Besar	2.234.407.104	2.229.474.760	99.78
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	385.304.000	280.707.900	72.85
	Penyusunan Laporan Keuangan	288.233.000	227.623.300	78.97
	Penyusunan Renstra Dan Renja PD	36.740.000	18.698.800	50.89
	Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP Dan LPPD PD	60.331.000	34.385.800	56.99
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	228.088.000	222.109.000	97.37
	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	228.088.000	22.109.000	97.37
6	Program Pengelolaan Pertanahan	394.840.000	360.650.634	91.34
	Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan	130.000.000	99.854.934	76.81
	Penataan Batas Wilayah	264.840.000	260.795.700	98.47

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
7	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	609.607.000,00	518.120.656	84.99
	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	584.607.000	497.228.456	85.05
	Pembinaan Administrasi Kembaga Kemasyarakatan//	25.000.000	20.892.200	83.56
	J U M L A H	32.620.147.406	29.883.804.629	91.61

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Cimahi dan disusun untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Cimahi. LKIP ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra).

Penyajian LKIP ini berdasar kepada indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi yang disusun menurut sasaran strategis sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 dapat disimpulkan:

1. Empat indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019, yaitu:
 - a. Nilai AKIP Kota,
 - b. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),
 - c. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, dan
 - d. Nilai Rata-rata IKM Kota.
2. Terdapat dua sasaran yang telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Nilai LPPD dan Nilai Rata-rata IKM Kota, dan dua sasaran belum mencapai target yaitu Nilai AKIP Kota dan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
3. Usaha yang mendorong tercapainya target indikator nilai LPPD adalah:
 - a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - b. Melaksanakan desk pencermatan IKK;

- c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri.
4. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator Nilai Rata-rata IKM Kota adalah:
- a. Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
 - c. Pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP dan SPM;
 - d. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
5. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target indikator Nilai AKIP Kota adalah:
- a. Melakukan reviu secara ringkas terhadap RPJMD dan Renstra PD untuk lebih memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, memperhatikan keterpaduan perencanaan serta telah melakukan *cascade* kinerja;
 - b. *Cascade* kinerja dibangun berdasarkan proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD sehingga penyusunan IKU akan mengacu kepada *cascade* kinerja tersebut;
 - c. Melakukan integrasi sistem perencanaan kinerja, sistem penganggaran dan informasi kinerja, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
 - d. Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas capaian kinerja;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya pada pencapaian output kegiatan dan penyerapan anggaran namun juga evaluasi program untuk memastikan bahwa program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan

- efisien sebagai upaya pencapaian sasaran strategis maupun sasaran pembangunan kota;
- f. Mendorong penyusunan indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator Opini BPK adalah penyusunan Dokumen Standar Biaya Belanja dan Standar Harga Satuan yang tepat waktu sehingga penyusunan perencanaan dapat lebih akurat.
6. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target indikator Nilai Reformasi Birokrasi adalah:
- a. Menetapkan indikator dan target keberhasilan masing-masing area perubahan sehingga hasil yang akan dicapai dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat Kota Cimahi;
 - b. Meningkatkan implementasi PMPRB dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan para pokja untuk dapat memantau dengan baik perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - c. Melakukan evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan dalam proses bisnis;
 - d. Mereviu standar kompetensi pegawai yang didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi;
 - e. Menetapkan kebijakan studi tiru pada unit kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja percontohan zona integritas;
 - f. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundangan untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan alasan ditiapkannya peraturan tersebut;
 - g. Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai sehingga pelaksanaan RB lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh stakeholder;

- h. Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
7. Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 mengalokasikan belanja langsung sebesar Rp.32.620.147.406,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.883.804.629,- atau 91,61%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Cimahi telah melakukan efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp.2.736.342.777,- atau 8,39%.
8. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 dapat dikatakan baik namun tetap melakukan perbaikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:
- Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi secara berkala;
 - Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada awal tahun; dan
 - Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Cimahi, Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720520 199901 1 001